Pengertian: Jurnal Pendidikan Indonesia (PJPI)

E-ISSN: 2986-9528| P-ISSN: 2986-9439
Website https://ejournal.lapad.id/index.php/pjpi

Open Access under CC BY NC SA
Copyright © 2026, Sri Yunita, et.al

Vol. 4, No. 3, 2026, 2147-2158
DOI:https://doi.org/10.61930/pjpi.v4i3.

Peran Pendidikan Nilai Moral Melalui Pembelajaran Pancasila terhadap Pengembangan Diri di Lingkungan Perguruan Tinggi

Sri Yunita[1)] , Elsa Islami Nastiti[2)], Anastasya Putri Pasaribu[3)], Catherine Rosiana Br. Simamora[4)], Selvia Fransiska Sihite[5)], Dwi Nova Fitria Ningsih[6)]
[1,2,3,4,5,6)] Universitas Negeri Medan, Kabupaten Deli Serdang, Indonesia

*Corresponding Author: sr.yunita@unimed.ac.id, elsaislaminastiti31@gmail.com, Pasaribuanastasya25@gmail.com, Catherinesimamora9@gmail.com, selviasihite276@gmail.com, dwinovafitriaa@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the role of moral value education delivered through Pancasila instruction in the personal development of university students. A qualitative approach utilizing a literature review method was employed. Data were gathered from scholarly literature relevant to moral value education, character education, Pancasila instruction, and student personal development, and subsequently analyzed through thematic categorization, synthesis, and interpretation. The findings indicate that moral value education plays a role in shaping students' personal development across cognitive, affective, and behavioral dimensions. Pancasila instruction serves as a strategic platform for internalizing the values of divinity, humanity, unity, democracy, and social justice. These values foster integrity, empathy, tolerance, collaborative skills, democratic attitudes, leadership, responsibility, and a commitment to the common good. Therefore, Pancasila instruction should be implemented in a contextual and participatory manner to ensure that moral value education transcends mere conceptual understanding and manifests in the students' actual lives.

Keywords: *Moral Value Education; Pancasila Instruction; Personal Development; University Students*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran pendidikan nilai moral melalui pembelajaran Pancasila terhadap pengembangan diri mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka. Data diperoleh dari berbagai literatur ilmiah yang relevan dengan pendidikan nilai moral, pendidikan karakter, pembelajaran Pancasila, dan pengembangan diri mahasiswa, kemudian dianalisis melalui pengelompokan tema, sintesis, dan interpretasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendidikan nilai moral berperan dalam membentuk pengembangan diri mahasiswa pada aspek kognitif, afektif, dan perilaku. Pembelajaran Pancasila menjadi wadah strategis untuk menginternalisasikan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Nilai tersebut mendukung terbentuknya integritas, empati, toleransi, kemampuan bekerja sama, sikap demokratis, kepemimpinan, tanggung jawab, serta kepedulian terhadap kepentingan bersama. Oleh karenanya, pembelajaran Pancasila perlu dilaksanakan secara kontekstual dan partisipatif agar pendidikan nilai moral tidak berhenti pada pemahaman konseptual, tetapi terwujud dalam kehidupan mahasiswa.

Kata Kunci: *Pendidikan Nilai Moral; Pembelajaran Pancasila; Pengembangan Diri; Mahasiswa*

PENDAHULUAN

Pendidikan nilai moral merupakan bagian mendasar dari proses pendidikan karena tujuannya tidak berhenti pada kecerdasan intelektual. Pendidikan nasional diarahkan untuk membentuk watak dan akhlak mulia peserta didik (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003). Pembentukan karakter itu sendiri mencakup tiga aspek utama, yaitu pengetahuan moral (*moral knowing*), perasaan moral (*moral feeling*), dan tindakan moral (*moral action*) (Lickona, 1991). Ketiganya perlu dikembangkan bersama-sama, sebab pengetahuan tentang kebaikan belum menjamin seseorang mau dan mampu mewujudkannya dalam perilaku.

Karena itulah pendidikan nilai moral tidak dapat tumbuh dengan sendirinya. Kohlberg (1981) memandang perkembangan moral sebagai proses bertahap yang dipengaruhi pengalaman dan kesempatan seseorang menalar persoalan moral. Pandangan ini menunjukkan bahwa kematangan moral tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi dibentuk melalui pengalaman yang berlangsung dari waktu ke waktu. Rest (1986) menambahkan bahwa tindakan bermoral melibatkan beberapa komponen psikologis yang saling berkaitan, tidak hanya kemampuan menalar. Lingkungan belajar juga berperan, karena perilaku dipelajari melalui pengamatan terhadap teladan dan konteks sosial di sekitar individu (Bandura, 1977). Dengan demikian, pendidikan nilai moral memerlukan proses yang terarah, berkelanjutan, dan didukung lingkungan yang kondusif, termasuk di perguruan tinggi.

Di Indonesia, pendidikan nilai moral pada jenjang pendidikan tinggi tidak berdiri lepas dari konteks kurikuler. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menetapkan Pendidikan Pancasila sebagai bagian dari Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU). Dalam kerangka ini, yang menjadi inti persoalan adalah pendidikan nilai moral, sedangkan pembelajaran Pancasila berfungsi sebagai wadah institusional yang menampung, menstrukturkan, dan mengoperasionalkan proses tersebut di lingkungan kampus. Pancasila di sini bukan tujuan akhir kajian, melainkan saluran resmi bagi perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan nilai moral secara terstruktur.

Urgensi penguatan pendidikan nilai moral kian terasa di tengah globalisasi dan pesatnya teknologi informasi yang berdampak ganda bagi mahasiswa. Globalisasi membuka akses informasi dan peluang pengembangan diri yang lebih luas (Amalia, dkk.,

2024). Namun, derasnya budaya asing yang tidak selalu sejalan dengan nilai kebangsaan berpotensi menggeser orientasi nilai generasi muda ke arah individualisme, hedonisme, dan pragmatisme (Arfina, dkk., 2022). Menurunnya toleransi, meningkatnya intoleransi di ruang digital, rendahnya partisipasi sosial, dan krisis identitas moral pada sebagian mahasiswa menunjukkan bahwa pendidikan nilai moral perlu diperkuat secara substantif, apa pun wadah kurikulernya.

Penguatan tersebut berkaitan erat dengan pengembangan diri mahasiswa. Pengembangan diri merupakan proses berkelanjutan yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik untuk membentuk pribadi yang utuh, mandiri, dan berkarakter (Fitri, dkk., 2026). Dari sudut pandang psikologi motivasi, perkembangan seseorang yang sehat ditopang oleh terpenuhinya kebutuhan dasar akan otonomi, kompetensi, dan keterhubungan sosial (Ryan & Deci, 2000). Pendidikan nilai moral yang baik semestinya tidak berhenti pada penyampaian norma, tetapi ikut menumbuhkan kemandirian dan kematangan pribadi mahasiswa.

Tuntutan itu pada akhirnya mengarah pada tanggung jawab perguruan tinggi sebagai institusi yang menaungi proses belajar mahasiswa. Institusi pendidikan tinggi tidak hanya bertugas mencetak lulusan yang kompeten secara akademik dan profesional, tetapi juga lulusan yang matang secara moral dan beretika dalam bermasyarakat (Alya, dkk., 2024). Artinya, keberhasilan perguruan tinggi tidak cukup diukur dari penguasaan keilmuan lulusannya, melainkan juga dari kesiapan mereka menjalani kehidupan bersama dengan landasan nilai yang kuat. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan wadah yang secara sadar dan terencana mengarahkan proses pembentukan moral di lingkungan kampus. Dalam kerangka inilah, pendidikan nilai moral yang disalurkan melalui pembelajaran Pancasila memegang peran strategis sebagai penopang proses pengembangan diri mahasiswa (Faturahman, dkk., 2022). Melalui wadah tersebut, nilai-nilai moral tidak hanya dikenalkan sebagai pengetahuan, tetapi juga dihadirkan sebagai bagian dari proses pembelajaran yang terstruktur. Dengan begitu, mahasiswa diharapkan dapat memiliki karakter dan nilai positif secara holistik (Faturahman, dkk., 2022). Oleh karena itu, peran pendidikan nilai moral dalam pengembangan diri mahasiswa penting ditelaah lebih lanjut, terutama ketika pembelajaran Pancasila diposisikan sebagai wadah penyampaiannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research/literature review*). Pendekatan kualitatif dipilih karena sesuai untuk memahami suatu fenomena secara mendalam melalui penafsiran terhadap makna, bukan pengukuran angka (Creswell, 2014; Moleong, 2017). Studi pustaka sendiri merupakan rangkaian kegiatan yang berkenaan dengan pengumpulan data dari kepustakaan, pembacaan, pencatatan, dan pengolahan bahan penelitian (Zed, 2004). Metode ini dipilih karena tujuan penelitian bersifat deskriptif-analitis, yaitu mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam peran pendidikan nilai moral terhadap pengembangan diri mahasiswa tanpa memerlukan pengumpulan data primer di lapangan. Tinjauan pustaka yang disusun secara sistematis juga dapat menjadi dasar untuk menghimpun dan mengevaluasi pengetahuan yang sudah ada tentang suatu topik (Snyder, 2019).

Sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder, yaitu data yang tidak diperoleh langsung dari subjek penelitian, melainkan dari dokumen yang telah tersedia (Sugiyono, 2019). Data tersebut berasal dari artikel jurnal ilmiah nasional yang relevan dan mutakhir, mencakup tema pendidikan nilai moral, pendidikan karakter, pembelajaran Pancasila, dan pengembangan diri mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi. Karena sumber data berbentuk dokumen, proses pengkajiannya dapat dipandang sebagai analisis dokumen, yaitu prosedur sistematis untuk menelaah dan mengevaluasi dokumen agar menghasilkan pemahaman dan pengetahuan empiris (Bowen, 2009). Pemilihan sumber dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan relevansi topik, kredibilitas publikasi, dan kebaruan tahun terbit agar hasil kajian mencerminkan perkembangan wacana akademik terkini.

Proses analisis berupa pengumpulan literatur yang relevan, identifikasi dan kategorisasi temuan berdasarkan tema (nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial), kemudian sintesis dan interpretasi untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif tentang peran pendidikan nilai moral melalui pembelajaran Pancasila terhadap pengembangan diri mahasiswa. Tahapan ini sejalan dengan analisis data kualitatif yang berlangsung melalui kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles, dkk., 2014). Pengelompokan temuan berdasarkan tema mengikuti prinsip analisis tematik, yaitu mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan pola atau tema dalam data (Braun & Clarke, 2006). Analisis dilakukan secara kritis dengan

membandingkan dan menghubungkan berbagai perspektif dari sumber yang dikaji, termasuk perbedaan pandangan antarpeneliti mengenai kelemahan implementasi Pendidikan Pancasila di lapangan, sehingga hasil kajian tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dan reflektif.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Hakikat Pendidikan Nilai Moral

Moral merupakan istilah yang menggambarkan pola perilaku seseorang yang berkaitan dengan penilaian terhadap baik dan buruk. Menurut KBBI, moral diartikan sebagai ajaran mengenai baik dan buruk yang diterima secara umum, mencakup perbuatan, sikap, kewajiban, akhlak, budi pekerti, dan kesusilaan. Secara etimologis, istilah ini berasal dari bahasa Latin *mos* (jamak: *mores*) yang berarti adat, kebiasaan, tingkah laku, karakter, tabiat, atau watak, yang kemudian berkembang menjadi pemahaman mengenai kebiasaan berperilaku secara baik (Marulafau, dkk., 2025). Secara konseptual, pendidikan nilai moral atau karakter mencakup tiga dimensi utama, yaitu kognitif (pengetahuan tentang baik dan buruk), afektif (kepekaan dan kepedulian moral), dan konatif atau perilaku (kemampuan bertindak sesuai nilai yang diyakini) (Utami & Harmanto, 2022). Ketiga dimensi ini harus dikembangkan secara terpadu agar nilai moral tidak berhenti pada tataran pengetahuan, tetapi terinternalisasi menjadi bagian dari kepribadian individu.

Pendidikan nilai dan moral dimaknai sebagai proses edukasi yang menanamkan, memupuk, serta memperkuat pemahaman atas nilai, norma, dan kaidah etika agar para siswa dapat berpikir, bersikap, dan berperilaku serasi dengan norma di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, maupun negara (Wahyuni, 2021). Kementerian Pendidikan Nasional menetapkan bahwa fokus utama dari pendidikan karakter berada pada peningkatan kualitas personal murid serta penciptaan iklim belajar yang kondusif. Secara perorangan, proses tersebut bertujuan mengoptimalkan kecerdasan emosional, membiasakan tindakan terpuji berbasis nilai agama yang universal, serta membangun jiwa kepemimpinan yang berintegritas. Pendidikan karakter juga dirancang untuk mencetak pribadi yang mandiri, kreatif, dan berjiwa nasionalis melalui ekosistem sekolah yang aman, berintegritas, mendidik, serta dipenuhi semangat kebangsaan. Penelitian terkait pendidikan karakter menekankan krusialnya perancangan yang terencana dan holistik,

bukan sekadar aktivitas yang terpisah (Berkowitz & Bier, 2004). Sejalan dengan itu, Naiheli, dkk. (2022) menyebutkan bahwa sumber daya manusia yang bermutu tinggi di era globalisasi ditandai oleh perpaduan kompetensi yang unggul dan karakter yang kokoh. Bagi kalangan mahasiswa, karakter tersebut tidak terbentuk secara instan, melainkan merupakan akumulasi panjang dari kebiasaan, cara pandang, dan kultur akademik yang diperoleh dari tingkatan pendidikan sebelumnya hingga akhirnya bertransformasi menjadi identitas diri yang melekat.

Pembelajaran Pancasila sebagai Wadah Penyelenggaraan Pendidikan Nilai Moral

Di perguruan tinggi Indonesia, pendidikan nilai moral tidak diselenggarakan sebagai mata kuliah tersendiri, melainkan disalurkan melalui wadah kurikuler resmi, yaitu mata kuliah Pendidikan Pancasila dalam Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU). Posisi Pancasila perlu dipahami secara proporsional, yaitu sebagai kerangka institusional yang menampung proses pendidikan nilai moral, bukan sebagai substansi nilai yang berdiri terlepas dari kajian moral yang lebih luas. Pendidikan Pancasila memegang peran strategis dalam mentransformasi karakter mahasiswa melalui integrasi proses perkuliahan, aktivitas organisasi kemahasiswaan, dan penguatan budaya akademik yang bernapas nasionalisme (Ladjard, dkk., 2025). Secara normatif, nilai-nilai Pancasila memuat landasan etis bagi kehidupan berbangsa (Latif, 2011), dan kelima silanya dipahami sebagai satu kesatuan yang saling berkaitan (Kaelan, 2016). Kelima nilai itu, yakni ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial, menjadi acuan bagi pembentukan moralitas publik, pencegahan degradasi nilai, dan penguatan identitas kebangsaan. Kontribusi tersebut hanya akan optimal apabila nilai Pancasila diinternalisasikan ke dalam kehidupan sosial mahasiswa lewat pendekatan pembelajaran yang kontekstual dan partisipatif (Suyanto & Widodo, 2021). Gagasan ini sejalan dengan pandangan bahwa pendidikan bermakna ketika terhubung dengan pengalaman dan keterlibatan peserta didik dalam kehidupan bersama (Dewey, 1916).

Meski demikian, implementasi Pendidikan Pancasila di lembaga formal tidak lepas dari kritik. Rahman (2023) menyoroti kecenderungan pengajaran yang terlalu kaku, bertumpu pada aspek kognitif, dan mengabaikan dimensi refleksi serta tindakan nyata mahasiswa. Hal ini diperkuat temuan Heryanti dan Rinjani (2026) bahwa orientasi pengajaran Pancasila masih berpusat pada transfer pengetahuan moral, pola yang sejalan

dengan tren pendidikan nilai dan kewarganegaraan yang condong memprioritaskan hafalan konsep atau norma teoretis. Namun, Pranata, dkk. (2024) menyanggah bahwa kelemahan tersebut bersumber dari esensi nilai Pancasila. Menurut mereka, masalah mendasarnya terletak pada strategi pembelajaran guru atau dosen yang belum mampu beradaptasi dengan karakteristik generasi muda saat ini. Dengan demikian, keberhasilan pembelajaran Pancasila sebagai wadah sangat bergantung pada sejauh mana proses pendidikan nilai moral di dalamnya dirancang secara bermakna. Jika wadah ini hanya diisi hafalan normatif tanpa penghayatan nilai, fungsi substantifnya sebagai sarana pendidikan moral tidak akan tercapai. Sebaliknya, jika diisi dengan proses yang partisipatif dan kontekstual dapat menjadi sarana yang efektif untuk membentuk kematangan moral.

Pengembangan Diri Mahasiswa di Perguruan Tinggi

Pengembangan diri atau *self-development* dapat dipahami sebagai usaha sadar dan berkelanjutan yang dilaksanakan individu guna meningkatkan kualitas dirinya, mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik (Syahrani, dkk., 2026). Proses ini diulang hingga kapasitas individu berkembang hingga mencapai kemandirian, mulai dari pengambilan keputusan, upaya meraih kesuksesan, hingga terbentuknya kemandirian dan aktualisasi diri, dengan tujuan membantu penyesuaian terhadap lingkungan (Dewi, dkk., 2025). Di perguruan tinggi, pengembangan diri tidak hanya berfokus pada penguasaan ilmu dan keterampilan teknis, melainkan juga pada pembentukan kompetensi abad ke-21 seperti karakter, komunikasi, kolaborasi, dan berpikir kritis, melalui integritas pendidikan moral (Alfikri, dkk., 2025). Pertumbuhan mahasiswa melibatkan pembentukan kompetensi, kemandirian, dan integritas sebagai bagian dari identitas diri (Chickering & Reisser, 1993), dan pengalaman belajar serta lingkungan kampus berhubungan dengan perubahan nilai dan penalaran moral mahasiswa (Pascarella & Terenzini, 2005). Di era disrupsi dan persaingan global, pengembangan diri holistik menjadi kebutuhan mendesak, karena lulusan diharapkan memiliki *hard skill* yang memadai sekaligus *soft skill* dan karakter yang kuat untuk berkontribusi positif di masyarakat majemuk. Dalam konteks ini, pendidikan nilai moral menjadi fondasi bagi pengembangan diri yang seimbang antara kecerdasan intelektual dan kematangan karakter.

Peran Pendidikan Nilai Moral terhadap Pengembangan Diri Mahasiswa

Kajian literatur menunjukkan bahwa pendidikan nilai moral memainkan peran penting dalam perkembangan diri mahasiswa, dan di perguruan tinggi Indonesia nilai-nilai tersebut dapat diserap melalui pembelajaran Pancasila sebagai wadah yang memberi konteks kebangsaan sekaligus ruang penerapan nilai dalam kehidupan akademik dan sosial. Pertama, nilai ketuhanan dan spiritualitas menumbuhkan kesadaran etis serta religius sebagai dasar berperilaku. Dalam pembelajaran Pancasila, nilai ini tercermin lewat sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang mendorong mahasiswa mengembangkan integritas, kejujuran, dan tanggung jawab. Karakter dari sila ini dapat berasal dari olah hati, mencakup kejujuran, keimanan, ketakwaan, keadilan, ketertiban, amanah, ketaatan pada peraturan, tanggung jawab, empati, keberanian menghadapi risiko, dan jiwa nasionalisme. Karakter dari olah pikir meliputi kecerdasan, inovasi, rasa ingin tahu yang tinggi, dan kepekaan terhadap lingkungan (Ristantomo, 2022). Dengan demikian, pendidikan nilai moral pada aspek ketuhanan tidak sekadar tentang pemahaman keagamaan, namun juga membentuk sikap dan perilaku yang mencerminkan integritas. Kedua, nilai kemanusiaan menumbuhkan empati, toleransi, tenggang rasa, dan penghormatan terhadap harkat serta martabat manusia sebagaimana tercermin dalam sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, serta mendukung kecerdasan emosional dan sosial mahasiswa. Melalui interaksi dengan individu berlatar sosial, budaya, dan keyakinan beragam, mahasiswa belajar menghargai perbedaan dan membangun hubungan harmonis, sejalan dengan gagasan bahwa kontak antarkelompok dapat mengurangi prasangka bila berlangsung dalam kondisi yang mendukung, seperti kedudukan setara dan tujuan bersama (Allport, 1954). Pendidikan juga harus menumbuhkan kemampuan berpikir kritis serta imajinasi empatik terhadap sesama (Nussbaum, 2010). Nilai ini dapat dikembangkan melalui diskusi kelompok dan proyek sosial yang mendorong mahasiswa mengurangi sikap individualistis, menghargai pendapat orang lain, dan meningkatkan kepedulian terhadap rekan serta masyarakat (Namira, dkk., 2025; Sipayung, dkk., 2025). Sikap saling membantu dalam mengatasi kesulitan akademik serta hubungan yang ramah tanpa membedakan latar belakang turut memperkuatnya (Hasan, dkk., 2025).

Ketiga, prinsip persatuan dan solidaritas mendorong rasa nasionalisme, kecintaan pada tanah air, keterampilan berkolaborasi, serta penghormatan terhadap kebhinekaan yang selaras dengan sila Persatuan Indonesia. Nilai tersebut sangat krusial dalam

menunjang kerja sama di tengah masyarakat yang majemuk dari segi sosial dan budaya. Kaum muda dapat menumbuhkan jiwa nasionalisme lewat keteladanan dan partisipasi nyata dalam membentuk karakter bangsa, salah satunya melalui penyemaian kesadaran bersama serta keharmonisan lewat peran aktif mengatasi masalah atau pemecahan konflik (Febrianto & Nugroho, 2023). Selain itu, nilai kebersamaan terefleksikan dalam kerja sama tim, di mana kolaborasi yang berorientasi pada ketergantungan positif terbukti meningkatkan capaian pembelajaran dan kualitas hubungan antarpeserta (Johnson & Johnson, 2009). Oleh sebab itu, penanaman nilai moral terkait persatuan tidak sekadar memperkuat rasa cinta tanah air, tetapi juga mengasah keterampilan bergotong royong demi meraih sasaran bersama.Keempat, konsep demokrasi dan tradisi musyawarah mengasah keterampilan berpikir kritis, kebiasaan hidup demokratis, serta kebesaran hati dalam menerima perbedaan pandangan sebagaimana terkandung dalam sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Dalam dunia mahasiswa, nilai ini memperkuat jiwa kepemimpinan, kecakapan berkomunikasi, perundingan, dan proses penetapan keputusan, khususnya di lingkungan organisasi kemahasiswaan. Kepemimpinan yang berlandaskan sila keempat mengedepankan kearifan, keadilan, dan kemaslahatan bersama, dengan mengutamakan mufakat serta menjauhi gaya kepemimpinan otoriter maupun sewenang-wenang (Habeahan, 2024). Maka dari itu, pengajaran nilai moral lewat pembelajaran Pancasila berpotensi menjadi wadah efektif untuk mencetak kepemimpinan yang mengutamakan kebijaksanaan, keterlibatan aktif, dan kepentingan umum.

Kelima, nilai keadilan sosial membangkitkan empati publik, budaya kerja sama, serta kepedulian terhadap kemaslahatan bersama selaras dengan prinsip Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Nilai ini juga memicu kesadaran mahasiswa atas berbagai masalah sosial yang dapat diwujudkan melalui aksi kemasyarakatan dan pengabdian. Penerapannya dalam kehidupan mahasiswa terlihat dari pemenuhan hak secara seimbang, sehingga setiap mahasiswa memperoleh peluang dan perlakuan setara dalam pelbagai kegiatan (Suhartono & Suhartono, 2021). Pandangan ini sejalan dengan gagasan Rawls (1971) bahwa keadilan menghendaki adanya kesempatan yang setara serta aturan bersama yang adil. Di samping itu, Nurjanah, dkk. (2025) menguraikan bahwa sila kelima mengedepankan keselarasan antara hak dan kewajiban, sehingga pemahaman dan pengaplikasiannya membantu mahasiswa membangun perilaku adil, bertanggung jawab,

serta peduli pada kepentingan publik. Secara menyeluruh, kelima dimensi nilai moral ini saling terikat dalam membentuk dasar pengembangan diri mahasiswa. Nilai ketuhanan meletakkan landasan etis dan integritas, nilai kemanusiaan menumbuhkan empati serta sikap saling menghargai, nilai persatuan memperkokoh kolaborasi dalam keberagaman, demokrasi dan musyawarah mengasah kemampuan berpikir serta kepemimpinan, sedangkan keadilan sosial menanamkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar. Dengan demikian, pengajaran nilai moral menjadi elemen vital bagi kematangan karakter mahasiswa, di mana pembelajaran Pancasila berfungsi sebagai sarana yang menyediakan kerangka edukatif dan konteks kebangsaan untuk menanamkan nilai-nilai tersebut.

SIMPULAN

Berdasarkan penelusuran literatur, pendidikan moral memegang peranan krusial dalam mendukung pengembangan diri mahasiswa secara menyeluruh, yang mencakup dimensi kognitif, afektif, hingga perilaku. Pembelajaran Pancasila hadir sebagai sarana kelembagaan yang strategis untuk menanamkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta keadilan sosial ke dalam kehidupan mahasiswa. Kelima prinsip tersebut berkontribusi signifikan terhadap pembentukan integritas, empati, toleransi, kemampuan berkolaborasi, jiwa demokratis, kepemimpinan, rasa tanggung jawab, dan kepedulian terhadap kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, pengajaran nilai moral melalui Pancasila hendaknya tidak sekadar berfokus pada pemahaman teori atau hafalan semata, melainkan harus diorientasikan pada penghayatan dan pengaplikasian nyata di lingkungan akademik maupun masyarakat. Temuan ini juga mengindikasikan bahwa keberhasilan pendidikan moral ditentukan oleh perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang berorientasi pada konteks nyata serta melibatkan partisipasi aktif.

Perguruan tinggi disarankan memperkuat pelajaran Pancasila lewat aktivitas yang mendorong refleksi, diskusi, kolaborasi, pemecahan masalah, dan penerapan nilai moral dalam konteks nyata, sehingga mahasiswa dapat lebih bermakna menginternalisasi nilai-nilai tersebut. Dosen tidak hanya menyampaikan pengetahuan, melainkan juga berperan sebagai fasilitator dan contoh dalam membangun budaya akademik yang menegaskan nilai moral. Kampus harus mendukung proses ini melalui kegiatan organisasi, interaksi sosial, dan budaya akademik yang menyediakan ruang bagi mahasiswa untuk

mengamalkan nilai Pancasila. Peneliti berikutnya dapat memperluas studi tentang pendidikan nilai moral dengan penelitian lapangan guna memperoleh gambaran empiris penerapan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan mahasiswa.

DAFTAR PUSTAKA

Allport, G. W. (1954). *The nature of prejudice*. Addison-Wesley.

Alya, A., Handayani, D., Harefa, D. L., Salwa, H. A., Putri, M., Arifah, M., & Rachman, F. (2024). Peran pendidikan Pancasila dalam membangun karakter mahasiswa di era globalisasi saat ini. *KONSENSUS: Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi, 2*(2), 1–10. https://doi.org/10.62383/risoma.v2i3.86

Amalia, M., Lestari, S. R., & Mulyana, A. (2024). Dampak globalisasi terhadap sistem pendidikan menurut perspektif hukum dan sosiologi. *Indonesian Journal of Law and Justice, 2*(2), 1–16. https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i2.3331

Arfina, S. K., Meidi, S. N. H., Sari, W., Wahyuni, Y., & Nugraha, R. G. (2022). Pengaruh masuknya budaya asing terhadap nilai-nilai Pancasila pada era milenial. *Jurnal Kewarganegaraan, 6*(1), 2150–2152. https://doi.org/10.31316/jk.v6i1.2945

Berkowitz, M. W., & Bier, M. C. (2004). Research-based character education. *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, *591*(1), 72–85. https://doi.org/10.1177/0002716203260082

Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, *9*(2), 27–40. https://doi.org/10.3316/QRJ0902027

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, *3*(2), 77–101. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa

Chickering, A. W., & Reisser, L. (1993). *Education and identity* (2nd ed.). Jossey-Bass.

Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.

Dewey, J. (1916). *Democracy and education*. Macmillan.

Faturahman, P. et al. (2022). Peranan Mata Kuliah Pendidikan Pancasila sebagai Filterasi Budaya Asing bagi Mahasiswa di Era Globalisasi, 6(12), 11990–11997. https://doi.org/10.31004/jptam.v6i2.4356

Fitri, S. N. M., Rosyada, N. A., Maulidina, F. R., Pratama, M. P., & Aini, D. K. (2026). Pengembangan diri berbasis nilai Al-Qur'an dan Hadits dalam mendorong aktualisasi potensi: Studi kualitatif. *Al-Amin: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial Humaniora, 4*(1), 70–81. https://doi.org/10.53398/alamin.v4i1.832

Johnson, D. W., & Johnson, R. T. (2009). An educational psychology success story: Social interdependence theory and cooperative learning. *Educational Researcher*, *38*(5), 365–379. https://doi.org/10.3102/0013189X09339057

Kaelan. (2016). *Pendidikan Pancasila*. Paradigma.

Kohlberg, L. (1981). *Essays on moral development: Vol. 1. The philosophy of moral development*. Harper & Row.

Latif, Y. (2011). *Negara paripurna: Historisitas, rasionalitas, dan aktualitas Pancasila*. Gramedia Pustaka Utama.

Lickona, T. (1991). *Educating for character: How our schools can teach respect and responsibility*. Bantam Books.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.

Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.

Nussbaum, M. C. (2010). *Not for profit: Why democracy needs the humanities*. Princeton University Press.

Pascarella, E. T., & Terenzini, P. T. (2005). *How college affects students: Vol. 2. A third decade of research*. Jossey-Bass.

Rawls, J. (1971). *A theory of justice*. Harvard University Press.

Rest, J. R. (1986). *Moral development: Advances in research and theory*. Praeger.

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. *American Psychologist*, *55*(1), 68–78. https://doi.org/10.1037/0003-066X.55.1.68?urlappend=%3Futm_source%3Dresearchgate.net%26utm_medium%3Darticle

Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, *104*, 333–339. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039

Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Zed, M. (2004). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.